

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Myanmar (Burma) merupakan sebuah negara yang berdaulat di Asia Tenggara, di sebelah barat Myanmar berbatasan dengan negara Bangladesh dan India, disebelah timur berbatasan dengan Thailand dan Laos, serta disebelah utara dan timur laut berbatasan dengan Tiongkok. Myanmar dikenal sebagai negara multi-etnis yang didominasi oleh etnis Bamar yang merupakan satu kelompok oleh suku Sino – Tibet dimana populasinya hampir 70% serta negara Myanmar memiliki luas 676.578 km². Myanmar berhasil meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 4 Januari 1948.¹

Pasca kemerdekaan, Myanmar menjadi negara demokratis dengan menganut sistem pemerintahan parlementer dalam pimpinan perdana Menteri U Nu, beliau dikenal sebagai salah satu tokoh penggagas gerakan non-blok pada konferensi Bandung pada tahun 1955.² Dalam sistem pemerintahan tersebut terdapatnya partai Liga Anti-Fasis Kebebasan Rakyat (AFPFL) dimana partai tersebut mengalami perpecahan internal dan akan berdampak bagi keberlangsungannya demokrasi Myanmar pada saat bersamaan Kepala Militer Jenderal Ne Win melancarkan suatu kudeta pada tahun 1962 dimana melengserkan

¹ Zulfikar, Fahri. "Sistem Pemerintahan Myanmar, Ibu Kota, dan Letak Geografisnya". detikedu. 2021. (diakses, 9 September, 2021)

² Puspita Sari, Amanda. "Jatuh Bangun Myanmar Menuju Pemilu Demokratis". CNNIndonesia. 2015. (diakses, 9 September, 2021)

pemerintah U Nu dan berupaya membentuk sistem pemerintahan Junta Militer. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan Junta Militer, Ne Win melakukan berbagai upaya seperti menasionalisasikan seluruh perusahaan besar Myanmar, membentuk pemerintahan suatu partai yang dikenal sebagai Partai Sosialis Burma yang berkuasa, beliau mendirikan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh para jenderal militer setelah itu Ne Win resmi menjadi presiden Myanmar.³

Sistem pemerintahan Junta Militer dikenal sebagai sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan suatu negara dikuasai oleh para militer yang bersifat tegas dalam menjalankan tugas pemerintahannya dan bagi warga negara harus mematuhi peraturan yang diatur oleh sistem pemerintahan tersebut. Transisi politik pada tahun 2011 mengubah pemerintahan Myanmar yang semula berada dalam pemerintahan junta militer menuju pemerintahan demokratis, disebabkan dalam pemerintahan junta militer mengakibatkan Myanmar menjadi negara tertutup dikarenakan pemerintahan militer membatasi kerjasama ekonomi dengan negara lain, tidak adanya hak asasi manusia untuk masyarakat, serta tidak diizinkan adanya turis yang berada di Myanmar, sistem pemerintahan tersebut mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan krisis ekonomi. Masyarakat Myanmar tidak tinggal diam, mereka menginginkan hak asasinya dan kebebasan sebagai individu, menurut mereka demokrasi menjadi

³ Ibid

sistem pemerintahan yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan negara Myanmar⁴.

Secara umum demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana warga negaranya mendapatkan hak kebebasan yang sama baik secara individu dan diperbolehkan berpartisipasi secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan dan pembuatan suatu hukum. Terdapat dua tokoh yang mendeskripsikan arti demokrasi, yang pertama adalah Thomas Carothers beliau mendeskripsikan demokrasi adalah sebuah kebebasan untuk rakyat dalam memberikan pendapat dan memilih dalam hal berbau politik seperti membentuk sebuah partai politik maupun pemilu⁵. Sedangkan Menurut Roberth Dhal, beliau mengemukakan tiga instrumental demokrasi untuk mewujudkan kebebasan bagi masyarakat yaitu, melalui pemilu yang bebas dan adil, memaksimalkan setiap individu untuk menentukan pilihannya (*self-determination*), menciptakan moral serta kemampuan untuk menentukan pilihan berdasarkan norma dan kemampuan memerintah sendiri (*self-governing*). Dalam pelaksanaan sistem demokrasi memiliki keunggulan yang diketahui dapat membantu mencegah tumbuhnya pemerintahan kaum otoriter dimana demokrasi dapat menjamin bagi warga negaranya untuk mendapatkan hak asasinya, menjamin kebebasan individu yang luas bagi masyarakatnya.⁶

⁴ Devi, Konsam Shakila. "Myanmar Under the Military Rule 1962-1988". *International Research Journal of Social Sciences*. 2014. (diakses, 9 September, 2021)

⁵ Winarno, Budi "Pengertian Demokrasi dan Krisis Globalisasi" hlm 40. 2007. (diakses, 9 September, 2021)

⁶ Ibid.

Sebelum terjadinya transisi politik di Myanmar terdapat dua gerakan pada tahun 1988 dan tahun 2007, gerakan tersebut dikenal gerakan 8888 pada 8 Agustus tahun 1988 gerakan tersebut sebagai bentuk aksi bahwa perubahan pada sistem pemerintahan Myanmar tidak menjadikan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan dalam gerakan tersebut menewaskan lebih dari 3.000 korban jiwa⁷. Selanjutnya diikuti oleh pihak oposisi yang membentuk partai politik yang dikenal sebagai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang di pimpin oleh Aung San Suu Kyi demi menyambut pemilu pada Mei 1990. Dalam pemilu tersebut terbilang adanya kecurangan serta sejumlah pihak oposisi yang diasingkan atau di tahan dan ditempatkan dalam rumah tahanan⁸. Setelah kurang lebih 19 tahun munculnya gerakan perlawanan yang dikenal sebagai *Saffron Revolution* gerakan ini diketahui dipimpin oleh para biksu⁹, dalam gerakan perlawanan ini terjadi demi mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi dikarenakan meningkatnya krisis sosial dan ekonomi yang terjadi di Myanmar, korban dalam gerakan perlawanan ini tidak hanya masyarakat sipil tetapi tokoh – tokoh agama seperti biksu ikut menjadi korban dimana dalam menghentikan gerakan perlawanan ini militer tidak segan melakukan kekerasan sehingga gerakan *Saffron Revolution* menjadi salah satu

⁷ Asiaweek. “*The 8888 People Uprising in Burma*” 2013 (diakses, 9 September, 2021)

⁸ Christa, Saloh. “Satu Tahun Pasca Pemilu di Myanmar”. DeutcheWelleNews. 2011. (diakses, 9 September, 2021)

⁹ Freeman, Joe. The ‘Good Monk’ Myth. *The Atlantic*. 2017. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/09/saffron-revolution-good-monk-myth/541116/>. (diakses, 9 September, 2021)

berita paling terkenal dikalangan masyarakat internasional maupun penjurur negeri.¹⁰

Kemudian, negara barat maupun organisasi internasional seperti Uni Eropa memberikan sejumlah sanksi terhadap negara Myanmar dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia bagi warga negara Myanmar.

Sejak terjadinya transisi politik di Myanmar pada tahun 2011 dibawah pimpinan presiden Thein Shein terdapat usaha yang cukup keras seperti membangun aturan – aturan hukum yang kuat, serta usaha untuk menciptakan pemerintahan yang memprioritaskan demokrasi sebagai budaya sistem pemerintahan Myanmar. Namun proses demokratisasi ini masih terbilang lemah, dalam proses demokratisasi ini melibatkan partai demokrasi dan kelompok etnis, dan ditujukan untuk membangun perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan di Burma terlebih dahulu.¹¹ Dalam mencapai tujuan itu, komunitas internasional harus tetap fokus pada Burma, dan memaksimalkan upayanya dalam membantu mewujudkan transisi politik. Dalam proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar membuat Uni Eropa tertarik dan ingin berkontribusi dalam proses demokratisasi ini serta diharapkan dapat menjadi salah satu peluang bagi Uni Eropa untuk mempromosikan demokrasi di negara Myanmar dan di seluruh dunia¹².

¹⁰ Alison Tate.. “*Saffron Revolution*”. *Journal of International Federation for Human Rights*. 2007. (diakses, 9 September, 2021)

¹¹ Yin Hlaing Kyaw , Robert H. Taylor and Tin Maung Maung Than. “Myanmar Beyond Politics to Societal Imperatives.” 2005. (diakses, 9 September, 2021)

¹² Freedom House, “Myanmar: Freedom in the World 2018,” 2018. (diakses, 9 September, 2021)

Pada 1 april 2012 Myanmar kembali mengadakan pemilu dengan tujuan memilih wakil parlemen dan memperbolehkan sebanyak 100 wartawan untuk meliput pemilu. Myanmar juga meminta langsung kepada perwakilan Uni Eropa untuk menjadi pengamat dalam pemilu, saat pemilu ini berlangsung kondisi negara Myanmar jauh lebih baik. Hasil pemilu yang mendominasi ke NLD dengan memenangkan sebanyak 43 kursi di parlemen¹³.

Dalam demokratisasi Myanmar terdapat banyak opini dan kritik dari masyarakat internasional dan juga persiden Thein Sein mendapatkan pujian dari sekretaris jendral PBB menurutnya Myanmar sangat berusaha dalam melakukan reformasi dan mulai menuju kepada pemerintahan yang lebih demokratis¹⁴.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Mengapa Uni Eropa tertarik dalam membantu demokratisasi di Myanmar?
2. Bagaimana peran Uni Eropa di dalam proses demokratisasi di Myanmar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

¹³ Yolanda Utami Nilasari. "Proses Perubahan di Myanmar : Menuju Demokrasi Melalui Pemilihan Umum." 2014. (diakses, 9 September, 2021)

¹⁴ Ibid.

1. Menganalisis proses transisi politik di Myanmar dari pemerintahan junta militer hingga demokrasi.
2. Mengetahui peran organisasi internasional seperti Uni Eropa, dan masyarakat internasional dalam proses demokratisasi Myanmar.
3. Mengetahui motif yang melatar belakangi terjadinya demokratisasi di Myanmar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini bermanfaat dalam menjelaskan tentang teori yang di dapatkan sewaktu kuliah, karena ada pembahasan mengenai politik, ekonomi, sosial yang berhubungan dengan sistem pemerintahan demokrasi.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran dari salah satu contoh suatu negara dalam memperjuangkan negaranya serta suatu sistem pemerintahan yaitu Demokrasi yang bebas dalam berpendapat, memilih, dan bersuara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, kegunaan penelitian, sistematika penelitian dari skripsi ini.

BAB II KERANGKA PENELITIAN

Bab ini isinya mengenai tinjauan pustaka dari buku – buku , serta jurnal online yang berhubungan dengan topik yang diangkat. Dalam skripsi ini teori-teori dan konsep yang akan digunakan antara lain teori Neo-Liberalisme dan konsep Demokrasi. Selain itu dalam bab ini terdapat konsep organisasi internasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS

Bab ini berisikan mengenai pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Sebagai penulis akan membahas tentang peran uni eropa dalam demokratisasi di Myanmar disertai dengan berbagai penjelasan upaya tersebut dengan teori - teori dan konsep yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dianalisis pada Bab IV. Selain itu, sebagai penulis akan memberikan sedikit saran dan rekomendasi yang mengacu pada tulisan.

Sebagaimana telah di tuliskan dalam Bab I tentang pembahasan singkat mengenai judul penulisan ini serta rangkaian – rangkaian teori, konsep serta

rangkaian sub bab yang akan dituliskan pada sub bab berikutnya. Pada Bab selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang teori serta konsep yang digunakan dalam menganalisis judul “PERAN UNI EROPA DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI MYANMAR”

